Taput Masih Krisis .....

Dari Halaman 1

Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Sumut telah berada di titik longsor untuk melakukan pemantauan langsung. Setibanya di lokasi, tim mendapati jalur benar-benar terputus akibat tumpukan tanah, batu besar, dan pepohonan yang menutup seluruh badan jalan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat, Tim Bid TIK Polda Sumut menerbangkan drone pemantau. Dari udara, tim dapat melihat kondisi longsor secara menyeluruh, termasuk panjang area terdampak, potensi longsor susulan, hingga titik-titik yang memungkinkan menjadi jalur alternatif bagi tim evakuasi dan distribusi bantuan.

Pemantauan ini menjadi langkah penting mengingat kawasan tersebut memiliki kontur tanah labil akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Data visual dari drone akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam percepatan penanganan, pembukaan akses, dan pengiriman logistik bagi warga yang kemungkinan masih terisolasi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menegaskan bahwa Polda Sumut terus memaksimalkan seluruh sumber daya untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi.

"Polda Sumut bergerak all out. Tim di lapangan, termasuk Bid TIK, terus bekerja tanpa henti untuk memetakan situasi dan mendukung proses evakuasi. Drone yang diterbangkan membantu kami melihat kondisi aktual sehingga keputusan dapat diambil lebih tepat dan cepat. Kami memastikan seluruh langkah difokuskan pada keselamatan masyarakat dan percepatan pembukaan akses," ungkap Kombes Ferry.

Hingga saat ini, pemantauan udara masih berlangsung dan koordinasi lintas satuan terus dilakukan untuk mempercepat penanganan longsor di Parsikaman Km 38. Selain itu, Polda Sumut juga terus mengupayakan dukungan tambahan untuk memperkuat tim di lapangan. **(A-10)**

Tim DVI Polda Sumut Identifikasi 290 Korban .....

Dari Halaman 1

paten/kota dengan total 30 personel, terdiri dari 10 personel DVI Mabes Polri dan 20 personel DVI Polda Sumut.

"Kami telah menggelar operasi DVI yang tersebar di seluruh kabupaten di Sumatera Utara dengan kekuatan 30 personel. Terdiri dari 10 personel DVI Mabes Polri dan selebihnya dari Polda Sumut," ujar Kombes Pol Taufik Ismail dalam keterangan resminya di RS Bhayangkara TK II Medan, Rabu (3/12/25).

"Per hari Selasa, 2 Desember 2025, kami telah mengidentifikasi sebanyak 290 korban yang tersebar di 12 kabupaten/kota wilayah Polda Sumut."

Karumkit menjelaskan bahwa seluruh korban hingga saat ini berhasil diidentifikasi menggunakan data sekunder seperti ciri fisik, sidik jari, maupun properti yang melekat, karena mayoritas jenazah masih dalam kondisi relatif utuh pada fase awal.

Namun pekerjaan tim ke depan akan semakin menantang. Saat ini masih terdapat 122 korban yang tercatat hilang, dan banyak di antaranya diperkirakan sudah mulai mengalami pembusukan.

"Ini mungkin seminggu ke depan akan lebih sulit untuk identifikasi karena jenazah yang masih tertimbun mengalami proses pembusukan. Untuk itu kami menyiapkan langkah identifikasi menggunakan data primer, yaitu sampel DNA," jelasnya.

"Jika jenazah tidak teridentifikasi dan karena keterbatasan tempat penyimpanan, kami akan makamkan dengan penandaan khusus. Jika di kemudian hari ada kecocokan DNA, kami bisa menunjukkan lokasi pemakaman kepada keluarga."

Hingga hari ini, seluruh 290 jenazah yang sudah teridentifikasi telah dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Berdasarkan pendataan terkini, Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi wilayah dengan dampak paling berat, disusul beberapa daerah lain. Adapun rinciannya:

- Kab. Tapanuli Tengah: 86 orang meninggal dunia, 104 orang hilang
- Kab. Tapanuli Selatan: 84 orang MD, 4 orang hilang
- Kota Sibolga: 47 orang MD, 9 orang hilang
- Kab. Tapanuli Utara: 34 orang MD, 12 orang hilang
- Kota Medan: 12 orang MD
- Kab. Langkat: 14 orang MD
- Kab. Humbang Hasundutan: 8 orang MD, 1 orang hilang
- Kab. Pakpak Bharat: 2 orang MD
- Nias Selatan: 1 orang MD
- Kota Padang Sidempuan: 1 orang MD
- Kota Binjai: 1 orang MD

Dalam penanganan korban luka, seluruh pasien dirawat di rumah sakit setempat, termasuk RS Bhayangkara Batangtoru.

"Kalau nanti memerlukan perawatan ataupun rujukan, kita kirim ke Kota Medan," jelas Karumkit.

"Persediaan obat sejauh ini sudah kita terima dari Mabes Polri, dan sudah didistribusikan ke kabupaten/kota yang paling memerlukan, terutama Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga," ujarnya.

Karumkit menjelaskan bahwa saat ini belum ditemukan kendala yang signifikan, namun minggu berikutnya menjadi fase paling krusial.

"Sementara ini kendala belum ada, tapi seminggu ke depan kemungkinan besar kita akan menghadapi kesulitan karena jenazah yang belum ditemukan sudah mengalami pembusukan. Sidik jari atau wajah mungkin sudah rusak, sehingga metode DNA menjadi cara terakhir yang paling akurat."

Operasi DVI akan terus berlangsung mengikuti masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah. Seluruh elemen kesehatan dan identifikasi Polda Sumut dan Mabes Polri tetap disiagakan di lapangan.**(A-10)**

Mentan Pastikan Stok Beras Sumut Aman .....

Dari Halaman 1

Mentan menambah menjadi 15 ribu ton dan akan segera dikirim ke Sumut.

"Kami tanda tangan dengan Gubernur di lokasi, permintaannya 5 ribu ton, kami siapkan 3 kali lipatnya, kami kirim. Saudaraku sabar, pemerintah tidak akan biarkan satu orangpun kekurangan beras," kata Andi Amran Sulaiman, di Kompleks Pergudangan Sarundik, Jalan Sibolga-Padangaidimpuan, Tapteng, Rabu (3/12/2025).

Saat ini 600 ton beras telah sampai ke Pelabuhan Sibolga, dan kemudian dilanjutkan 10.000 ton. Amran juga berharap bantuan beras ini bisa dilakukan dalam satu tahap.

"Sudah tiba, sudah sandar 600 ton dan kami akan kirim untuk cadangan 10.000 ton, kalau bisa satu kapal, satu tahap karena orang-orang sudah butuh," kata Amran.

Selain itu, terkait sawah yang rusak, Kementan akan memperbaikinya hingga siap tanam kemudian menyiapkan bibit untuk 40 Ha. Begitu juga untuk jagung, sekitar 604 Ha lahan rusak dan akan segera diperbaiki dan disiapkan bibit untuk 1.000 Ha.

"Kami beri waktu 1 minggu untuk administrasinya, dimana patok tanahnya, kemudian kita akan perbaiki, alat beratnya kami bekerja sama dengan kontraktor lokal, Pak Bupati, Pak Gubernur tinggal tunjuk, langsung kerjakan," terang Amran.

Sementara untuk akses ke lokasi-lokasi bencana, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pihaknya terus bekerja untuk membuka akses utama distribusi. Sehingga seluruh bantuan bisa masuk ke daerah-daerah yang terisolasi.

"Semuanya lagi benar-benar berupaya memperbaiki jalur-jalur utama, baik yang masuk ke Tapteng dan juga yang didalam Taptengnya, kalau masih ada tumpukan lumpur ini akan menjadi prioritas," kata Bobby Nasution.**(bes)**

Warga Aceh Tamiang Mulai Kelaparan .....

Dari Halaman 1

ini makan kami sudah habis," ujarnya kepada CNN Indonesia, Selasa (2/12).

Zara juga mengaku belum ada upaya penyelamatan dari petugas terhadap warga yang mengungsi di lantai 2 ruko atau bangunan di wilayah tersebut.

"Tidak ada penyelamatan, lewat pun BPBD di sini, kami minta tolong untuk kawan kami yang tersangkut tidak ada yang mau menolong. Di mana letak kemanusiaan. Percuma ada bantuan tapi tidak bisa membantu kita semua di sini," tuturnya.

Bantuan pemerintah belum merata karena terkendala medan yang terputus. Banyak jembatan di Aceh putus, membuat daerah terisolasi.

Sebagai solusi pemerintah coba memasok bantuan lewat jalur udara, salah satunya dengan helikopter. Tapi, dengan cara ini, bantuan tak bisa tersalur secara merata dan optimal.

Ketidakmerataan bantua itu membuat warga di Bener Meriah dan Aceh Tengah terpaksa menjarah toko demi tetap bertahan hidup.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bertambah menjadi 753 orang hingga Rabu (3/12) pagi.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut.

Rinciannya korban meninggal di Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 301 orang dan korban hilang 163 orang.

Di sisi lain, Badan SAR Nasional (Basarnas) telah mengevakuasi sebanyak 35.857 warga korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dihimpun Basarnas hingga Selasa (2/12) pukul 20.00 WIB.

Secara rinci, di Aceh, Basarnas mengevakuasi 1.600 warga dari total 18 wilayah yang terdampak. Kemudian di Sumatra Utara (Sumut) sebanyak 4.599 warga telah dievakuasi dari 11 kabupaten/kota terdampak.

Sedangkan di Sumatra Barat, ada sebanyak 29.658 warga yang telah dievakuasi dari total 11 kabupaten/kota terdampak bencana.**(cnni/js)**

Dewas KPK Periksa JPU Gegara Tak Hadirkan .....

Dari Halaman 1

pemeriksaan tersebut saat ditanya soal rencana mengklarifikasi tim JPU yang menangani perkara dugaan suap proyek jalan di Sumut.

"Benar, siang ini kami memeriksa JPU, sebagaimana laporan ke Dewas," kata Gusrizal kepada wartawan, Rabu (3/1/2025).

Pemanggilan ini menambah daftar panjang polemik terkait penanganan kasus di Sumut tersebut. Sebelumnya, pada 17 November 2025, Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) telah melaporkan Kasatgas Penyidikan KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, kepada Dewas.

Koordinator KAMI, Yusril S Kaimudin, menuduh adanya dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang dilakukan oleh Kasatgas tersebut.

"Kami hari ini memberikan laporan kepada Dewan Pengawas KPK, terkait dengan persoalan laporan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa Purbo Bekti selaku Kasatgas KPK," kata Yusril S Kaimudin.

Yusril menerangkan, bahwa pihaknya menanyakan independensi KPK dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut

Yusril juga menyoroti peristiwa sensitif yang terjadi di tengah proses hukum ini: kebakaran rumah hakim yang meminta tim JPU KPK menghadirkan Bobby sebagai saksi. "Itu sudah bukan rahasia umum," imbuhnya.

Ia pun menyampaikan beberapa tuntutannya kepada Dewas KPK. Pertama, agar Dewas melakukan pemeriksaan etik terhadap AKBP Rossa Purbo Bekti atas dugaan pelanggaran integritas, independensi, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas KPK 3/2021.

Kedua, Dewas KPK harus menilai dan melusuri sejauh mana tindakan tersebut mempengaruhi kredibilitas lembaga. Ketiga, Dewas harus mengambil langkah etik dan kelembagaan yang diperlukan guna memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap KPK sebagai institusi penegakan hukum yang independen dan berintegritas tinggi.

"Ketika respon daripada laporan pengaduan ini tidak terpublikasi secara luas kepada masyarakat semua, maka kami akan turun ke jalan," pungkas Yusril.**(rm/js)**

Ketika Hukum Lumpuh dan Pemerintah Buta, ...

Dari Halaman 1

Sudah lama rakyat melihat gejala ini. Aparat pemerintah yang seharusnya menjadi penjaga hutan, justru berubah menjadi penjaga gerbang izin eksploitasi. Di satu sisi mereka berpidato tentang "pembangunan berkelanjutan", tapi di sisi lain tangan yang sama menandatangani izin pembalakan dan tambang emas. Ironinya, mereka melakukannya sambil mengutip ayat atau menyebut "demi kesejahteraan rakyat". Padahal rakyatnya justru ditenggelamkan banjir, bukan ditopang kemakmuran.

Penegakan hukum lingkungan? Itu lebih sulit ditemukan daripada harimau Sumatra yang hampir punah.

Ketika gunung digerus tanpa ampun, tidak ada razia. Ketika alat berat naik ke bukit tanpa dokumen, tidak ada penertiban. Ketika sungai berubah menjadi keruh pekat dan ikan mati mengapung, tidak ada penyelidikan. Tapi begitu rakyat kecil menebang dua pohon untuk membangun jamban, langsung datang surat peringatan.

Inilah kesenjangan hukum yang busuk hingga ke akar. Dan apa yang busuk itu pasti mengundang bencana.

Pejabat-pejabat kita begitu sigap jika ada proyek. Begitu cekatan jika ada tender. Begitu tangkas ketika ada peluang selfie dan seremonial. Tapi untuk menjaga hutan? Mendengarkan suara rakyat? Menghentikan tambang yang merusak lingkungan? Semua itu tiba-tiba menjadi "proses panjang", "harus dikaji", "sedang kita koordinasikan".

Sementara itu, korporasi tambang justru bergerak seperti pasukan gurun, sangat rapi, cepat, penuh logistik. Mereka tidak menunggu rapat koordinasi. Mereka tidak butuh kajian akademik.

Yang mereka butuhkan hanyalah izin, dan sayangnya izin itu justru diberikan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga bumi, bukan menjualnya.

Dan ketika banjir datang, bukti kejahatan ekologis itu terbentang telanjang. Ada gelondongan kayu, lumpur setebal dada, batang-batang pohon yang hanyut seperti mayat sejarah. Alam memperlihatkan apa yang disembunyikan laporan.

Namun, alih-alih introspeksi, sebagian pejabat justru menyembunyikan tangan mereka dengan kalimat: "Ini semua takdir." Padahal Allah tidak pernah menuliskan takdir yang berbunyi: "Silakan rusak hutan, nanti rakyat yang menanggung akibatnya."

Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa yang bebas menjual bumi. Dan kelalaian seorang pemimpin adalah dosa yang berat: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Jika hukum negara lumpuh, Allah-lah yang mengadili melalui alam. Dan bukankah kita baru saja melihat bagaimana air bah datang menghapus dosa-dosa ekologis yang dibiarkan bertahun-tahun?

Banjir kali ini bukan sekadar peristiwa alam, melainkan vonis ekologis. Vonis yang jatuh karena pemerintah memilih buta, aparat memilih diam, dan hukum memilih memihak pada yang kaya.

Pertanyaannya kini adalah: Apakah mereka akan sadar, ataukah kita sedang menunggu edisi bencana berikutnya?

Bareskrim Selidiki .....

Dari Halaman 1

Tapanuli Tengah di Sumatera Utara serta sejumlah titik di Sumatera Barat. Wilayah-wilayah tersebut disebut berpotensi menjadi lokasi asal tumpukan log yang kini mencuri perhatian publik.

"Iya, penyelidikan diarahkan ke Sumut dan Sumbar," tambahnya.

Penyelidikan ini diharapkan dapat menjawab dugaan masyarakat terkait praktik pembalakan liar yang disinyalir memperparah dampak bencana di kawasan tersebut. **(rm/js)**

KLH Akan Panggil .....

Dari Halaman 1

Itu kan nanti akan kita undang lah," ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (3/12) dikutip Detik Finance.

Diaz mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk menelusuri kelengkapan perizinan lingkungan, termasuk kemungkinan dugaan pencemaran lingkungan.

"Akan kita undang dan untuk lihat apakah perizinan lingkungannya sudah lengkap atau belum, minggu depan. Kita menganalisa dari semua sisi, baik dari sisi alaminya, dan juga dari ketentuan lahan, vegetasi, dan juga dari perizinan lingkungan, apakah mencemarkan atau tidak, yang 8 perusahaan itu," imbuhnya.

Menurutnya, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakum) KLH. Ia belum bisa memastikan sanksi bagi delapan perusahaan tersebut jika terbukti melanggar.

"Kita lihat pelanggarannya seperti apa, tapi nanti kita akan komunikasikan dengan bagian Gakkum," ungkapnya.

Selain di Sumut, KLH juga akan menelusuri perusahaan-perusahaan yang memperparah banjir di Aceh dan Sumbar.

"Kalau di Aceh kita sudah telusuri, ini belum banyak kelapa sawit, yang sedikit-sedikit aja. Sumatera Barat lagi ditelusuri juga," pungkas Diaz.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 753 orang hingga Rabu (3/12) pagi. Adapun jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut.

Rinciannya korban meninggal di Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 301 orang dan korban hilang 163 orang.

Sedangkan di wilayah Sumbar, tercatat korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang. **(cnni/js)**

Ulama dan Masa Depan Komunikasi Publik

Dari Halaman 1

Di era ketika masyarakat Sumut semakin bergantung pada media digital sebagai sumber pengetahuan agama, Ketua MUI bukan lagi hanya pemimpin fatwa, tetapi juga figur komunikasi strategis. Ia harus mampu mengelola pesan keagamaan agar tetap otoritatif namun tetap adaptif terhadap budaya media.

Tantangan terbesar adalah menjaga agar pesan ulama tidak tenggelam dalam banjir informasi, distorsi, hoaks, dan dakwah instan yang kerap mengedepankan sensasi ketimbang substansi. Karena itu, Ketua MUI yang ideal adalah mereka yang memahami cara kerja media, logika publik, dan pola konsumsi informasi umat hari ini.

Di sinilah relevansi konsep two-step flow of communication dalam teori komunikasi massa. Masyarakat kini tidak langsung percaya pada informasi yang berseliweran di media sosial; mereka mencari figur kredibel yang menjadi rujukan. Ketua MUI Sumut harus muncul sebagai trusted leader sosok yang ucapannya menjadi rujukan keagamaan, moral, dan sosial. Ketika masyarakat terpecah oleh informasi yang saling bertentangan, ulama berperan sebagai penyaring dan pemberi makna. Kepemimpinan seperti ini membutuhkan integritas, ketenangan, dan kemampuan berbicara dalam bahasa publik.

Selain itu, MUI sebagai institusi memiliki fungsi agenda-setting. Melalui pernyataan, fatwa, dan sikap resminya, MUI dapat mendorong isu tertentu menjadi perhatian pemerintah dan media. Ketua MUI yang visioner mampu memanfaatkan fungsi ini untuk mengangkat persoalan strategis di Sumut: degradasi lingkungan, banjir, kemiskinan, kerukunan antaragama, literasi digital, hingga penyimpangan moral di ruang publik. Ulama bukan hanya mengingatkan, tetapi menuntun arah pembicaraan publik agar lebih konstruktif.

Namun, agar agenda-setting efektif, diperlukan kemampuan komunikasi organisasi yang kuat. MUI Sumut perlu dipimpin oleh figur yang mampu membangun relasi dua arah bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendengar aspirasi umat. Pemimpin yang mampu mengintegrasikan komunikasi tradisional melalui mimbar dengan komunikasi digital melalui media sosial dan platform daring. Ulama yang cakap menghadapi media mainstream sekaligus media baru: wawancara, pernyataan resmi, klarifikasi, hingga edukasi digital.

Kontribusi Ketua MUI terhadap stabilitas sosial Sumut juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan manajemen krisis komunikasi. Dalam berbagai isu sensitif pemilu, konflik identitas, kasus moral, atau rumor keagamaan ketua MUI berperan sebagai penenang publik. Dengan pilihan kata yang tepat, ulama mampu mencegah eskalasi, menurunkan ketegangan, dan memulihkan kepercayaan. Komunikasi krisis membutuhkan kebijaksanaan, bukan reaksi emosional.

Akhirnya, Ketua Umum MUI Sumut yang ideal adalah pemimpin yang mampu menjadikan MUI sebagai rumah besar umat Islam sebagaimana harapan banyak tokoh yang menampung segala corak keislaman dan mampu menyampaikan pesan yang inklusif, moderat, dan menyejukkan. Sosok yang memahami bahwa kekuatan ulama di era komunikasi massa bukan hanya pada kedalaman ilmu, tetapi pada kemampuan menyampaikan ilmu itu dalam bahasa yang diterima publik.

Masa depan komunikasi keagamaan Sumatera Utara sangat ditentukan oleh figur yang terpilih memimpin MUI. Karena itu, pemilihan kali ini bukan sekadar memilih pemimpin ulama, tetapi memilih arah komunikasi publik Islam di Sumut beberapa tahun ke depan apakah tetap relevan, konstruktif, dan menjadi cahaya dalam lanskap media yang kian gelap dan bising.